



GUBERNUR LAMPUNG
PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 19 TAHUN 2014

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS BISNIS DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT KERJA PADA BADAN PERWAKILAN
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DI JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2013, dijelaskan bahwa Sekretariat Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung di Jakarta telah berubah menjadi Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung di Jakarta, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu diatur Rencana Strategis Bisnis dan Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Kerja Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung di Jakarta;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Strategis Bisnis dan Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Kerja Sekretariat Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung di Jakarta, sesuai dengan huruf a, maka Peraturan Gubernur Lampung dimaksud, perlu ditinjau kembali menyesuaikan dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2013;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan kembali Rencana Strategis Bisnis dan Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Kerja pada Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung di Jakarta dengan Peraturan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.02/2006 tentang Persyaratan Administratif dalam rangka pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di lingkungan Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2013;

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/19 /IV.6/HK/2014 tentang Penetapan Unit Kerja Badan Perwakilan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Di Jakarta Sebagai Instansi Pemerintah Provinsi Lampung Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS BISNIS DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT KERJA PADA BADAN PERWAKILAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DI JAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
2. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
3. Rencana Strategis Bisnis adalah Rencana Strategi Bisnis BLUD Unit Kerja yang selanjutnya disebut RSB BLUD yang memuat Visi, Misi, dan Program Strategis yang akan dijalankan oleh BLUD Unit Kerja.
4. Visi adalah visi BLUD Unit Kerja yang merupakan cita-cita BLUD Unit Kerja yang harus dicapai.
5. Misi adalah penjabaran visi BLUD Unit Kerja.
6. Program Strategis adalah program prioritas untuk mencapai misi BLUD Unit Kerja.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung
8. Sekretaris Daerah Provinsi adalah Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
9. Badan Perwakilan adalah Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung di Jakarta.
10. Badan Layanan Umum Daerah Unit Kerja yang selanjutnya disingkat BLUD Unit Kerja adalah Unit Kerja pada Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
11. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah Pola Keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
12. Wisma Lampung dan Anjungan Lampung TMII Jakarta yang selanjutnya disebut Wisma dan Anjungan Lampung adalah unit pelayanan pada BLUD Unit Kerja.
13. Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM, adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal atau ketentuan tentang spesifikasi teknis tentang tolak ukur layanan minimal yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Daerah kepada masyarakat.
14. Peraturan Pola Tata Kelola Korporasi BLUD Unit Kerja adalah Peraturan yang mengatur tentang hubungan antara Gubernur Lampung, Badan Perwakilan sebagai Pengelola dengan Pejabat Pengelola dan Staf BLUD Unit Kerja pada Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung di Jakarta.
15. Peraturan Pola Tata Kelola Staf adalah Peraturan yang mengatur tentang hubungan, hak dan kewajiban dari Pimpinan dan Staf BLUD Unit Kerja pada Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung di Jakarta.
16. Pejabat Pengelola adalah pejabat pengelola BLUD Unit Kerja pada Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung di Jakarta yang merupakan pimpinan BLUD Unit Kerja pada Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung yang bertanggung jawab terhadap operasional Wisma dan Anjungan Lampung yang terdiri atas Kepala, Manajer Administrasi dan Keuangan, dan Manajer Operasional.

17. Pimpinan adalah Kepala BLUD yang dijabat pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Badan Perwakilan yang bertanggung jawab secara umum terhadap Badan Layanan Umum Daerah Unit Kerja.
18. Manajer adalah Manajer Administrasi dan Keuangan, dan Manajer Operasional.
19. Kepala Urusan adalah kepala urusan pada manajemen Administrasi dan Keuangan.
20. Kepala Unit adalah kepala unit pada manajemen operasional.
21. Staf adalah karyawan pelaksana administrasi dan keuangan serta operasional unit Wisma dan Anjungan Lampung.
22. Unit Pelayanan adalah Wisma Lampung dan Anjungan Lampung yang menyelenggarakan upaya pelayanan akomodasi, pelayanan pendukung, dan lain-lain.
23. Satuan Pengawas Internal adalah perangkat Badan Perwakilan yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu Kepala untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (*social responsibility*) dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat yang selanjutnya disingkat SPI.
24. Remunerasi adalah imbalan kerja Pejabat Pengelola, SPI dan seluruh Pegawai BLUD Unit Kerja yang dapat berupa Gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan atau pensiun.
25. Standard Pelayanan Minimal BLUD Unit Kerja pada Badan Perwakilan selanjutnya disebut SPM adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh Wisma dan Anjungan Lampung kepada masyarakat.

BAB II

ASAS UMUM DAN PELAKSANAAN

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD harus dilakukan berpedoman pada Rencana Strategis Bisnis dan Standar Pelayanan Minimal.
- (2) Pelaksanaan Rencana Strategis Bisnis dan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Implementasi Rencana Strategis Bisnis dan Standar Pelayanan Minimal dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, terbuka, berimbang, adil dan tidak diskriminatif dan akuntabel, serta diberlakukan praktek bisnis yang sehat tanpa mengutamakan pengambilan keuntungan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Rencana Strategis Bisnis PPK-BLUD Unit kerja wajib menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal merupakan bagian dari upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam kerangka peningkatan tata pemerintahan yang baik.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala BLUD Unit Kerja mengacu pada Rencana Strategis Bisnis yang meliputi Visi, Misi, Program Strategis, dan Pengukuran Laporan Kinerja BLUD Unit Kerja.
- (2) Rencana Strategis Bisnis bertujuan untuk menentukan arah dan menetapkan kebijakan dalam melaksanakan pelayanan BLUD Unit Kerja.

Pasal 5

- (1) Standar Pelayanan Minimal dimaksudkan sebagai pedoman bagi BLUD Unit Kerja dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan BLUD Unit Kerja.
- (2) Standar Pelayanan Minimal bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan BLUD Unit Kerja kepada masyarakat.

Pasal 6

Visi, Misi, Program Strategis, dan Pengukuran Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR (NILAI), BATAS WAKTU PENCAPAIAN DAN URAIAN RENCANA STRATEGIS BISNIS DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 7

- (1) BLUD Unit Kerja mempunyai tugas pokok untuk mengelola memelihara dan memanfaatkan Wisma dan Anjungan Lampung sebagai Kantor perwakilan, Mess Penginapan, tempat penyewaan ruang, media promosi dan informasi secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan azas ekonomi perusahaan dalam kesatuan sistem ekonomi Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
- (2) Jenis pelayanan untuk Wisma Lampung meliputi:
 - a. pelayanan penginapan
 - b. pelayanan restoran.
 - c. pelayanan meeting room.
 - d. pelayanan sewa ruang (space leasing).
- (3) Jenis pelayanan untuk Anjungan Lampung meliputi:
 - a. pelayanan penginapan
 - b. pelayanan cafetaria.
 - c. pelayanan meeting room.
 - d. pelayanan promosi dan informasi.

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) BLUD Unit Kerja yang menerapkan PPK-BLUD wajib melaksanakan pelayanan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal.

- (2) Kepala BLUD unit kerja yang menerapkan PPK-BLUD bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Badan Perwakilan.
- (3) Kepala BLUD Unit Kerja dalam penyelenggaraan pelayanan yang berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal dapat dibantu oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENERAPAN

Pasal 9

- (1) Kepala BLUD Unit Kerja yang menerapkan PPK-BLUD menyusun rencana kerja dan anggaran, target, serta upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan BLUD Unit Kerja berdasarkan Standar Pelayanan Minimal.
- (2) Setiap unit pelayanan dan administrasi manajemen BLUD Unit Kerja yang menerapkan PPK-BLUD menyusun rencana kerja dan anggaran, target, serta upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan BLUD unit kerja yang dipimpinnya berdasarkan Standar Pelayanan Minimal.
- (3) Setiap pelaksanaan pelayanan, BLUD Unit Kerja menyelenggarakan pelayanan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 10

- (1) Pembinaan BLUD Unit Kerja yang menerapkan PPK-BLUD dilakukan oleh Gubernur melalui Kepala Badan Perwakilan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, sumber daya manusia baik Pegawai Negeri Sipil maupun Non Pegawai Negeri Sipil, pendidikan dan latihan serta bantuan teknis lainnya.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 11

- (1) Pengawasan dilakukan oleh satuan pengawas internal dan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Lampung selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Satuan pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh internal auditor yang berkedudukan langsung dibawah Kepala BLUD Unit Kerja.

Pasal 12

- (1) Internal auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) bersama-sama jajaran manajemen BLUD Unit Kerja yang menerapkan PPK-BLUD menciptakan dan meningkatkan pengendalian internal.
- (2) Fungsi pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membantu manajemen dalam hal tercapainya prestasi kerja yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal.

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD yang menerapkan PPK-BLUD dilakukan oleh pejabat pembina dan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dilakukan juga oleh Satuan Pengawas Internal sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD Unit Kerja.

Pasal 14

Anggaran pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 dibebankan pada pendapatan operasional BLUD Unit Kerja yang ditetapkan melalui Rencana Strategis Bisnis yang dijabarkan dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BLUD Unit Kerja.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Ketentuan mengenai petunjuk teknis pelaksanaan operasional Rencana Strategis Bisnis dan Standar Pelayanan Minimal diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan/atau Keputusan Kepala BLUD Unit Kerja dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Dengan ditetapkan Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Lampung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Strategis Bisnis dan Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Kerja Sekretariat Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung di Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal ~~24~~ Maret ~~2014~~

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 24 Maret 2014

Pt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Ir. ARINAL DJUNAIDI
Pembina Utama Madya
NIP. 19560617 198503 1 005

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 12 TAHUN 2014
TANGGAL : 24 - 3 - 2014

RENCANA STRATEGIS BISNIS

I. RINGKASAN EKSEKUTIF

Badan Layanan Umum Daerah Unit Kerja pada Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung di Jakarta saat ini mengelola Wisma Lampung dan Anjungan Lampung Taman Mini Indonesia Indah Jakarta. Visi BLUD Unit Kerja adalah: “menjadi sentra pelayanan Pemerintah Provinsi Lampung di Jakarta yang handal dan berdaya saing serta memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah”. Untuk mewujudkan visi tersebut, dijabarkan dalam Misi dan Langkah-Langkah Strategis, dengan didasari oleh nilai-nilai luhur dan budaya kerja Badan Perwakilan yang diyakini akan mampu memberikan inspirasi kepada segenap karyawan untuk bersama mewujudkan visi tersebut.

Hasil analisa data tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 pelanggan Wisma dan Anjungan Lampung dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Berdasarkan Analisa SWOT (Strength, Weaknesses, Opportunities, Threats), Posisi siklus bisnis Wisma dan Anjungan Lampung terletak pada kwadran II/ posisi *Growth and Build*. Strategi pada posisi bisnis tersebut adalah Strategi intensif yang terdiri dari strategi *market penetration*, *market development* dan *product development*, serta strategi integrasi vertikal yang terdiri dari *forward*, *backward* dan *horizontal integration* dengan cara meningkatkan kualitas SDM dan kemampuan manajerial.

Berdasarkan siklus kehidupan bisnis BLUD Unit Kerja menetapkan langkah-langkah strategis dengan menggunakan pendekatan Balance Score Card dengan menentukan sasaran strategis berdasarkan 4 perspektif yaitu perspektif sumber daya manusia (pertumbuhan dan pembelajaran), perspektif bisnis internal, perspektif pelanggan, dan perspektif keuangan. Langkah strategis ini dituangkan pada Rencana Strategi Bisnis BLUD Unit Kerja yang ditekankan pada strategi pengembangan core bisnis Wisma dan Anjungan Lampung dengan tidak meninggalkan program-program penunjang core bisnis serta fungsi kedinasan dan sosial budaya.

Analisis situasi organisasi dilakukan dengan sistematika berturut-turut yaitu analisis lingkungan eksternal, analisis lingkungan internal, tujuan jangka panjang, Matriks Internal-Eksternal, matriks SWOT, pemilihan alternatif strategi, penentuan prioritas strategi, penyesuaian strategi, dan penentuan prioritas penyesuaian strategi.

II. RENCANA ORGANISASI

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Unit Kerja pada Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung di Jakarta dengan dua unit pelayanan Wisma dan Anjungan Lampung mempunyai tugas pokok untuk mengelola memelihara dan memanfaatkan Wisma Lampung sebagai Kantor perwakilan, Mess dan Penginapan dan tempat penyewaan ruang secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan azas ekonomi perusahaan dalam kesatuan sistem ekonomi Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

A. Visi dan Misi

1. Visi :

“Menjadi sentra pelayanan Pemerintah Provinsi Lampung di Jakarta yang handal dan berdaya saing serta memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.”

2. Misi :

- a. peningkatan manajemen pelayanan.
- b. peningkatan sarana dan prasarana.
- c. peningkatan dan pengembangan usaha serta pendapatan.

B. Analisis Lingkungan Strategis, Tujuan, dan Sasaran

1. Analisis Lingkungan Internal

a. Kekuatan

- 1) Wisma Lampung Jakarta
 - a) Gedung Wisma Lampung milik Pemerintah Provinsi Lampung yang dikelola oleh Badan Perwakilan berlantai 8 dengan fasilitas pusat bisnis lantai 1, perkantoran dan restoran lantai 2, lantai 3 s.d. lantai 7 penginapan (2 kamar VIP, 4 kamar Delux, dan 22 kamar superior);
 - b) Manajemen sudah dikelola sejak tahun 1998 oleh Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung di Jakarta (ex. Kantor Penghubung);
 - c) Tarif dan fasilitas yang tersedia masih kompetitif sehingga tingkat hunian relatif stabil dan cenderung meningkat.
- 2) Anjungan Lampung TMII Jakarta
 - a) Anjungan Lampung di bangun di atas lahan seluas 10,368,68 m2 oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung pada tahun 1973.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Pura Hindu Dharma, Gereja dan Masjid Diponegoro;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Gedung PIBW;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Anjungan Jawa Barat dan Arcipel (danau nusantara);
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Anjungan DKI Jakarta.
 - b) Fasilitas terdiri atas: Rumah Adat (Nuwou Balak), Balai Adat (Nuwou Sessat), Gedung Kantor dan Informasi (Nuwou Kattur), Panggung Terbuka (Battaiyan), Pesanggrahan (Nuwou Singgah) Anjula, Kafetaria, Landscape, Souvenir Shop, dan Musholla..
 - c) Manajemen sudah dikelola sejak tahun 1975 oleh Sekretariat Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung di Jakarta (ex. Kantor Penghubung);

b. Kelemahan

- 1) Wisma Lampung Jakarta
 - a) Status tanah Wisma Lampung adalah hak pakai untuk kepentingan dinas, sehingga pelayanan Wisma Lampung lebih diprioritaskan untuk dinas.

- b) Fasilitas Gedung sudah mengalami penyusutan selama 12 tahun, sehingga perlu perbaikan yang signifikan
 - c) Manajemen mesti memiliki karakteristik tersendiri yang harus mampu menjembatani antara kepentingan dinas dan umum serta tetap mampu menghasilkan pendapatan yang optimal;
 - d) Jumlah tamu baik Pegawai Daerah Provinsi dan 15 Kabupaten/Kota maupun masyarakat umum tidak akan terlayani dengan jumlah kamar Wisma Lampung yang tersedia;
 - e) Pesaing Jasa Akomodasi di Jakarta terus berkembang dengan meluasnya tempat-tempat kost harian serta jasa akomodasi yang lebih dekat dengan lokasi-lokasi tujuan konsumen ke Jakarta.
- 2) Anjungan Lampung TMII Jakarta
- a) Anjungan Lampung sebagai bagian dari Taman Mini Indonesia Indah merupakan aset Negara yang dikelola dalam Manajemen TMII.
 - b) Kosumen Anjungan Lampung adalah pegawai dan seniman daerah Provinsi dan 15 Kabupaten/Kota bila dalam jumlah besar dan berbagai urusan promosi belum dapat terfasilitasi secara optimal.

2. Analisis Lingkungan Eksternal

a. Peluang

- 1) Wisma Lampung Jakarta
- a) Lokasi strategis, dilalui berbagai sarana transportasi dari dan ke berbagai jurusan (termasuk Busway), juga hanya ± 25 km dari Bandara Soekarno Hatta, ± 100 km dari Pelabuhan Merak, dan ± 20 km ke Pemerintahan Pusat (untuk urusan dinas). Untuk kepentingan masyarakat umum khususnya ke Rumah Sakit Cipto (± 25 km), RS Harapan Kita dan RS Darmas (± 2 km) serta untuk perdagangan ke Pasar terbesar di Asia Tanah Abang (± 10 km), Central Park dan Mall Taman Anggrek (± 5 km) dan $\pm 20-30$ km ke pusat perdagangan Glodok dan Mangga Besar. Di samping itu, Jl. Tomang Raya merupakan daerah perbankan (Bank BCA, BNI, Danamon, CIMB Niaga, Standard Chartered, Mandiri, HSBC, Mayora, dan BII), dan perkantoran;
 - b) Wisma Lampung memiliki captive market yaitu Pegawai daerah Provinsi dan 15 Kabupaten /Kota se-Provinsi Lampung;
 - c) Persaingan, Jasa Akomodasi di Jakarta sangat kompetitif namun dengan harga dan fasilitas yang tersedia serta lokasi masih kompetitif sehingga tingkat hunian relatif stabil dan cenderung meningkat.
- 2) Anjungan Lampung TMII Jakarta
- a) Anjungan Lampung yang luas dan didukung sarana prasarana yang cukup lengkap serta berdekatan dengan fasilitas umum dan sosial berpeluang untuk mendapat kunjungan yang relatif banyak.

- b) Kosumen Anjungan Lampung adalah pegawai dan seniman daerah dari Provinsi dan 15 Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dalam jumlah cukup besar dan membawa berbagai urusan terutama promosi daerah;
- c) Harga dan fasilitas yang tersedia di Anjungan Lampung masih kompetitif sehingga tingkat pemakaian relatif stabil dan cenderung meningkat.

b. Kendala

1) Wisma Lampung Jakarta

- a) Status tanah Wisma Lampung adalah hak pakai untuk kepentingan dinas, sehingga memiliki keterbatasan usaha.
- b) Diperlukan sumber pembiayaan untuk perbaikan yang signifikan dan biaya operasional yang besar;
- c) Kesulitan untuk mewujudkan manajemen dengan karakteristik tersendiri yang harus mampu menjembatani antara kepentingan dinas dan umum serta tetap mampu menghasilkan pendapatan yang optimal;
- d) Jumlah kamar belum mampu melayani tamu baik Pegawai Daerah Provinsi dan 15 kabupaten/ Kota maupun masyarakat umum dalam jumlah besar;

2) Anjungan Lampung TMII Jakarta

- a) Untuk pengembangan usaha Anjungan Lampung masih dibatasi oleh Manajemen TMII.
- b) Anjungan Lampung dengan areal seluas 10,368,68 m² dengan 10 gedung memerlukan biaya operasional dan pemeliharaan yang cukup besar;
- c) Kompetitor, jasa akomodasi, promosi dan informasi di lingkungan Taman Mini Indonesia Indah sangat kompetitif, anjungan daerah lain pun (seperti Anjungan Jawa Tengah dan Jawa Barat) sudah mulai membangun fasilitas sebagaimana yang dimiliki Anjungan Lampung.

Untuk menganalisis lingkungan strategis menggunakan Analisis SWOT, yaitu analisis kondisi internal maupun eksternal suatu organisasi yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar untuk merancang strategi dan program kerja. Analisis internal meliputi penilaian terhadap faktor kekuatan (Strength) dan kelemahan (Weakness). Sementara, analisis eksternal mencakup faktor peluang (Opportunity) dan tantangan (Threat).

Ada dua macam pendekatan dalam analisis SWOT, yaitu:

1. Pendekatan Kualitatif Matriks SWOT

Pendekatan kualitatif matriks SWOT sebagaimana dikembangkan oleh Kearns menampilkan delapan kotak, yaitu dua paling atas adalah kotak faktor eksternal (Peluang dan Tantangan) sedangkan dua kotak sebelah kiri adalah faktor internal (Kekuatan dan Kelemahan). Empat kotak lainnya merupakan kotak isu-isu strategis yang timbul sebagai hasil titik pertemuan antara faktor-faktor internal dan eksternal.

STRENGTHS-WEAKNESSES-OPPORTUNITIES-THREATS MATRIX

		OPPORTUNITIES (O)	THREATS (T)
EKSTERNAL INTERNAL	1 Wisma Lampung Jakarta a) Lokasi strategis b) Memiliki captive market yaitu Pegawai Daerah Provinsi dan 15 Kabupaten/Kota c) Kompetitor Jasa Akomodasi sejenis cukup jauh d) Penerimaan masih dapat ditingkatkan 2 Anjungan Lampung TMII Jakarta a) Kunjungan konsumen meningkat b) Mempunyai captive market Pegawai dan Seniman Daerah c) Penerimaan Anjungan masih dapat ditingkatkan	1 Wisma Lampung Jakarta a) Diawasi Pemda DKI b) Sumber pembiayaan perbaikan dan operasional yang minim 2 Anjungan Lampung TMII Jakarta a) Pengembangan usaha Anjungan Lampung masih dibatasi oleh Manajemen TMII b) Biaya operasional dan biaya pemeliharaan masih tergantung Daerah c) Persaingan jasa akomodasi, promosi dan informasi di lingkungan TMII terus meningkat	
	STRENGTHS (S)	SO STRATEGI	ST STRATEGI
1 Wisma Lampung Jakarta a) Gedung milik Badan Perwakilan b) Memiliki SDM cukup banyak c) Tarif kompetitif d) Fasilitas cukup lengkap e) Tingkat hunian stabil 2 Anjungan Lampung TMII Jakarta a) Fasilitas lengkap b) Memiliki SDM cukup banyak c) Tarif kompetitif	1 Wisma Lampung Jakarta a) Mengoptimalkan pemanfaatan gedung b) Meningkatkan tingkat hunian dengan memanfaatkan captive market c) Pertahankan tarif di bawah harga pasar d) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarpras e) Mengoptimalkan kinerja SDM 2 Anjungan Lampung TMII Jakarta a) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarpras b) Meningkatkan kunjungan dengan captive market c) Menjaga tarif yang kompetitif	1 Wisma Lampung Jakarta a) Meningkatkan kerja sama Badan Perwakilan dengan Pemda DKI b) Memanfaatkan SDM yang ada untuk memelihara sarana prasarana 2 Anjungan Lampung TMII Jakarta a) Memanfaatkan kelengkapan fasilitas untuk usaha yang sesuai dengan Manajemen TMII b) Memanfaatkan SDM yang ada untuk memelihara sarana prasarana c) Mempertahankan tarif kompetitif	

WEAKNESSES (W)	WO STRATEGI	WT STRATEGI
1 Wisma Lampung Jakarta a) Status tanah hak pakai dinas b) Penyusutan fasilitas Gedung c) Dualisme karakteristik tamu dinas dan umum d) Kapasitas kamar sangat terbatas e) Kompetitor jasa akomodasi cukup banyak f) Kualitas SDM belum profesional g) Kesejahteraan karyawan belum standar	1 Wisma Lampung Jakarta a) Meningkatkan status tanah menjadi hak milik b) Meningkatkan umur fungsional fasilitas Gedung c) Mengakomodir perbedaan karakteristik tamu dinas dan umum d) Optimalisasi pemakaian kamar yang sangat terbatas e) Kompetitor jasa akomodasi cukup banyak f) Meningkatkan profesionalisme SDM g) Meningkatkan kesejahteraan karyawan	1 Wisma Lampung Jakarta a) Pertahankan pelayanan dinas b) Meningkatkan anggaran pemeliharaan fasilitas Gedung
2 Anjungan Lampung TMII Jakarta a) Kapasitas terbatas b) Manajemen belum mandiri c) Kesejahteraan karyawan belum standar d) Kompetitor terus bertambah	2 Anjungan Lampung TMII Jakarta a) Mengoptimalkan kapasitas yang terbatas b) Meningkatkan kemandirian manajemen c) Meningkatkan kesejahteraan karyawan d) Mempertahankan daya saing	2 Anjungan Lampung TMII Jakarta a) Meningkatkan kerja sama dengan Manajemen TMII b) Efisiensi biaya Operasional dan Pemeliharaan c) Meningkatkan kualitas pelayanan

Keterangan:

Sel A (SO): *Comparative Advantages*

Sel ini merupakan pertemuan dua elemen kekuatan dan peluang sehingga memberikan kemungkinan bagi suatu organisasi untuk bisa berkembang lebih cepat.

Sel B (ST): *Mobilization*

Sel ini merupakan interaksi antara ancaman dan kekuatan. Di sini harus dilakukan upaya mobilisasi sumber daya yang merupakan kekuatan organisasi untuk memperlunak ancaman dari luar tersebut, bahkan kemudian merubah ancaman itu menjadi sebuah peluang.

Sel C (WO): *Divestment/Investment*

Sel ini merupakan interaksi antara kelemahan organisasi dan peluang dari luar. Situasi seperti ini memberikan suatu pilihan pada situasi yang kabur. Peluang yang tersedia sangat meyakinkan namun tidak dapat dimanfaatkan karena kekuatan yang ada tidak cukup untuk menggarapnya. Pilihan keputusan yang diambil adalah (melepas peluang yang ada untuk dimanfaatkan organisasi lain) atau memaksakan menggarap peluang itu (investasi).

Sel D (WT): *Damage Control*.

Sel ini merupakan kondisi yang paling lemah dari semua sel karena merupakan pertemuan antara kelemahan organisasi dengan ancaman dari luar, dan karenanya keputusan yang salah akan membawa bencana yang besar bagi organisasi. Strategi yang harus diambil adalah *Damage Control* (mengendalikan kerugian) sehingga tidak menjadi lebih parah dari yang diperkirakan.

2. Pendekatan Kuantitatif Analisis SWOT

Data SWOT kualitatif di atas dapat dikembangkan secara kuantitatif melalui perhitungan Analisis SWOT yang dikembangkan oleh Pearce dan Robinson (1998) agar diketahui secara pasti posisi organisasi yang sesungguhnya.

Perhitungan yang dilakukan melalui tiga tahap, yaitu:

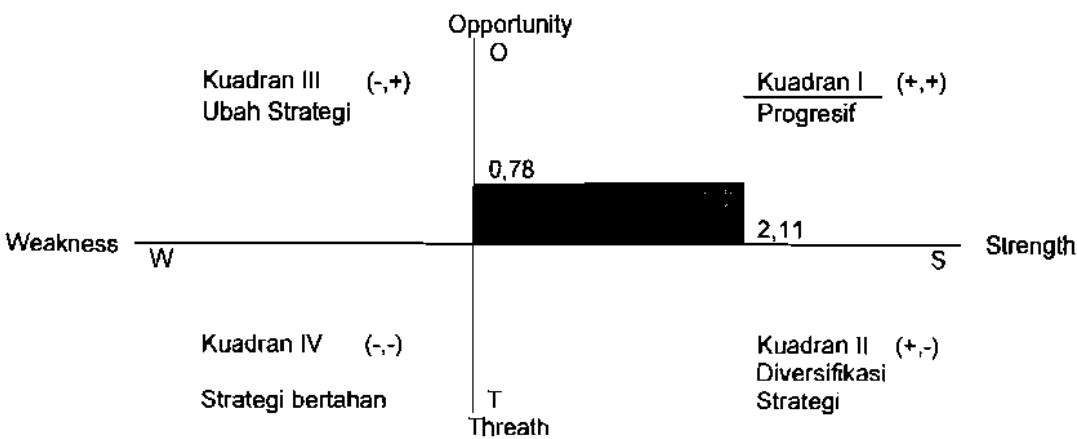
- Melakukan perhitungan skor (a) dan bobot (b) point faktor serta jumlah total perkalian skor dan bobot ($c = a \times b$) pada setiap faktor S-W-O-T; Menghitung skor (a) masing-masing point faktor dilakukan secara saling bebas (penilaian terhadap sebuah point faktor tidak boleh dipengaruhi atau mempengaruhi penilaian terhadap point faktor lainnya. Pilihan rentang besaran skor sangat menentukan akurasi penilaian namun yang lazim digunakan adalah dari 1 sampai 10, dengan asumsi nilai 1 berarti skor yang paling rendah dan 10 berarti skor yang paling tinggi. Perhitungan bobot (b) masing-masing point faktor dilaksanakan secara saling ketergantungan. Artinya, penilaian terhadap satu point faktor adalah dengan membandingkan tingkat kepentingannya dengan point faktor lainnya. Sehingga formulasi perhitungannya adalah nilai yang telah didapat (rentang nilainya sama dengan banyaknya point faktor) dibagi dengan banyaknya jumlah point faktor).
- Melakukan pengurangan antara jumlah total faktor S dengan W (d) dan faktor O dengan T (e); Perolehan angka (d = x) selanjutnya menjadi nilai atau titik pada sumbu X, sementara perolehan angka (e = y) selanjutnya menjadi nilai atau titik pada sumbu Y;
- Mencari posisi organisasi yang ditunjukkan oleh titik (x,y) pada kuadran SWOT.

INTERNAL FAKTOR EVALUATION (IFE) MATRIKS

FAKTOR SUKSES KRITIS			SKOR	BOBOT	TOTAL
KEKUATAN (STRENGTHS)					
1	Wisma Lampung Jakarta				
	a)	Gedung milik Badan Perwakilan	7	0.13	0.94
	b)	Memiliki SDM cukup banyak	5	0.10	0.48
	c)	Tarif kompetitif	7	0.13	0.94
	d)	Fasilitas cukup lengkap	5	0.10	0.48
	e)	Tingkat hunian stabil	5	0.10	0.48
2	Anjungan Lampung TMII Jakarta				
	a)	Fasilitas lengkap	9	0.17	1.56
	b)	Memiliki SDM cukup banyak	7	0.13	0.94
	c)	Tarif kompetitif	7	0.13	0.94
Total Kekuatan (S)			52		6.77
KELEMAHAN (WEAKNESSES)					
1	Wisma Lampung Jakarta				
	a)	Status tanah hak pakai dinas	5	0.11	0.53
	b)	Penyusutan fasilitas Gedung	5	0.11	0.53
	c)	Dualisme karakteristik tamu dinas dan umum	3	0.06	0.19
	d)	Kapasitas kamar sangat terbatas	7	0.15	1.04
	e)	Kompetitor jasa akomodasi cukup banyak	3	0.06	0.19
	f)	Kualitas SDM belum profesional	3	0.06	0.19
	g)	Kesejahteraan karyawan belum standar	3	0.06	0.19
2	Anjungan Lampung TMII Jakarta				
	a)	Kapasitas terbatas	5	0.11	0.53
	b)	Manajemen belum mandiri	5	0.11	0.53
	c)	Kesejahteraan karyawan belum standar	5	0.11	0.53
	d)	Kompetitor terus bertambah	3	0.06	0.19
Total Kelemahan (W)			47		4.66
Selisih Total Kekuatan - Total Kelemahan = S-W= x			6,77-4,66=		2.11

EKSTERNAL FAKTOR EVALUATION (EFE) MATRIKS

FAKTOR SUKSES KRITIS		SKOR	BOBOT	TOTAL
PELUANG (OPPORTUNITIES)				
1	Wisma Lampung Jakarta			
	a) Lokasi strategis	9	0.20	1.76
	b) Memiliki captive market yaitu Pegawai Daerah Provinsi dan 15 Kabupaten/Kota	8	0.17	1.39
	c) Kompetitor Jasa Akomodasi sejenis cukup jauh	7	0.15	1.07
2	Anjungan Lampung TMII Jakarta			
	a) Kunjungan konsumen meningkat	6	0.13	0.78
	b) Mempunyai captive market Pegawai dan Seniman Daerah	8	0.17	1.39
	c) Penerimaan Anjungan masih dapat ditingkatkan	8	0.17	1.39
Total Kekuatan (S)		46		7.78
KENDALA (THREATS)				
1	Wisma Lampung Jakarta			
	a) Diawasi Pemda DKI	7	0.21	1.44
	b) Sumber pembiayaan perbaikan dan operasional yang minim	8	0.24	1.88
2	Anjungan Lampung TMII Jakarta			
	a) Pengembangan usaha Anjungan Lampung masih dibatasi oleh Manajemen TMII	6	0.18	1.06
	b) Biaya operasional dan biaya pemeliharaan masih tergantung Daerah	8	0.24	1.88
	c) Persaingan jasa akomodasi, promosi dan informasi di lingkungan TMII terus meningkat	5	0.15	0.74
Total Kelemahan (W)		34		7.00
Selisih Total Kekuatan - Total Kelemahan = S-W= x		7,78-7,00 =		0.78



Kuadran I (positif, positif)

Posisi ini menandakan sebuah organisasi yang kuat dan berpeluang, Rekomendasi strategi yang diberikan adalah **Progresif**, artinya organisasi dalam kondisi prima dan mantap sehingga sangat dimungkinkan untuk terus melakukan ekspansi, memperbesar pertumbuhan dan meraih kemajuan secara maksimal.

Kuadran II (positif, negatif)

Posisi ini menandakan sebuah organisasi yang kuat namun menghadapi tantangan yang besar. Rekomendasi strategi yang diberikan adalah **Diversifikasi Strategi**, artinya organisasi dalam kondisi mantap namun menghadapi sejumlah tantangan berat sehingga diperkirakan roda organisasi akan mengalami kesulitan untuk terus berputar bila hanya bertumpu pada strategi sebelumnya. Oleh karena, organisasi disarankan untuk segera memperbanyak ragam strategi taktisnya.

Kuadran III (negatif, positif)

Posisi ini menandakan sebuah organisasi yang lemah namun sangat berpeluang. Rekomendasi strategi yang diberikan adalah **Ubah Strategi**, artinya organisasi disarankan untuk mengubah strategi sebelumnya. Sebab, strategi yang lama dikhawatirkan sulit untuk dapat menangkap peluang yang ada sekaligus memperbaiki kinerja organisasi.

Kuadran IV (negatif, negatif)

Posisi ini menandakan sebuah organisasi yang lemah dan menghadapi tantangan besar. Rekomendasi strategi yang diberikan adalah Strategi Bertahan, artinya kondisi internal organisasi berada pada pilihan dilematis. Oleh karenanya organisasi disarankan untuk menggunakan strategi bertahan, mengendalikan kinerja internal agar tidak semakin terperosok. Strategi ini dipertahankan sambil terus berupaya membenahi diri.

C. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

- a. menata administrasi pelayanan.
- b. menata dan mengembangkan SDM.
- c. meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan.
- d. meningkatkan produktivitas usaha.
- e. mengembangkan usaha komplementer/alternatif.
- f. meningkatkan pendapatan.

2. Sasaran

- a. tertib administrasi dan mudahnya prosedur pelayanan.
- b. tertata dan meningkatnya profesionalisme SDM.
- c. tersedianya sarana dan prasarana yang memenuhi kebutuhan pelayanan yang prima.
- d. semakin produktifnya bidang-bidang usaha yang telah ada.
- e. berkembangnya usaha-usaha komplementer/alternatif.
- f. meningkatnya kontribusi terhadap Pendapatan Asli daerah.

D. Program Strategis dan Indikator Kinerja

1. Program Strategis

Untuk mewujudkan visi dan misi BLUD Wisma dan Anjungan Lampung , beberapa program strategis yang akan ditempuh adalah:

- a) Misi Peningkatan Manajemen Pelayanan, program:
 - 1) penataan Administrasi.
 - 2) penataan dan Pembinaan SDM.
 - 3) peningkatan kesejahteraan SDM.
 - 4) standarisasi pelayanan (SPM).
- b) Misi Peningkatan Sarana dan Prasarana, program:
 - 1) rehabilitasi Peralatan Gedung.
 - 2) rehabilitasi Kamar/ruang Gedung.
 - 3) rehabilitasi Elektrikal/Mekanikal.
 - 4) penambahan Sarana dan Prasarana.
- c) Misi Peningkatan dan Pengembangan Usaha serta Pendapatan, program:
 - 1) peningkatan Hunian Wisma Lampung dan Nuwou Singgah Anjungan Lampung TMII Jakarta.
 - 2) peningkatan Usaha Sewa Ruang pada Wisma Lampung dan Anjungan Lampung TMII Jakarta.
 - 3) pengembangan Usaha Wisma Lampung dan Anjungan Lampung TMII Jakarta.
 - 4) efisiensi Biaya Operasional dan Pemeliharaan.
 - 5) penyesuaian Tarif.
 - 6) penataan Sumber-sumber Pendapatan.

b. Indikator Kinerja

No.	Misi	Program Strategis	Indikator Kinerja
1.	Peningkatan Manajemen Pelayanan	Penataan Administrasi. Penataan SDM Pembinaan SDM. Peningkatan kesejahteraan SDM. Standarisasi pelayanan.	- Jumlah/kali penataan - Jumlah/kali penataan - Jumlah/kali pembinaan - % kepuasan SDM - % capaian SPM
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana	a. Rehabilitasi Peralatan Gedung. b. Rehabilitasi Kamar/ruang Gedung. c. Rehabilitasi Elektikal/Mekanikal. d. Penambahan Sarana dan Prasarana.	- % akumulasi perbaikan - % akumulasi perbaikan - % akumulasi perbaikan - % penambahan sarpras
3.	Peningkatan dan Pengembangan Usaha serta Pendapatan	a. Peningkatan Hunian Wisma Lampung dan Pesangrahan Anjungan Lampung TMII Jakarta. b. Peningkatan Usaha Sewa Ruang pada Wisma Lampung dan Anjungan Lampung TMII Jakarta. c. Pengembangan Usaha Wisma Lampung dan Anjungan Lampung TMII Jakarta. d. Efisiensi Biaya Operasional dan Pemeliharaan. e. Penyesuaian Tarif f. Penataan Sumber-sumber Pendapatan.	- % peningkatan hunian - % peningkatan sewa ruang - Jumlah penambahan usaha - % pengurangan biaya - % tarif - Jumlah/kali penataan

E. Proyeksi Pelaksanaan Program/Kegiatan Strategis

Proyeksi dan Rentang waktu pelaksanaan program strategis tersebut dalam kurun waktu 5 tahun sebagai berikut :

No.	Program dan Kegiatan	Tahun Pelaksanaan				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Penataan Administrasi.	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali
	Penataan SDM	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali
	Pembinaan SDM.	6 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali
	Peningkatan kesejahteraan SDM.	60%	75%	80%	85%	90%
	Standarisasi pelayanan.	50%	60%	80%	90%	100%

2.	a. Rehabilitasi Peralatan Gedung.	20%	60%	70%	80%	90%
	b. Rehabilitasi Kamar/ruang Gedung.	50%	75%	80%	85%	90%
	c. Rehabilitasi Elektrikal/Mekanikal.	50%	80%	85%	90%	90%
	d. Penambahan Sarpras.	10%	30%	10%	10%	10%
3.	a. Peningkatan Hunian Wisma Lampung dan Pesangrahan Anjungan Lampung TMII Jakarta.	3%	5%	10%	10%	10%
	b. Peningkatan Usaha Sewa Ruang pada Wisma Lampung dan Anjungan Lampung TMII Jakarta.	3%	5%	10%	10%	10%
	c. Pengembangan Usaha Wisma Lampung dan Anjungan Lampung TMII Jakarta.	-	1 unit	2 unit	3 unit	4 unit
	d. Efisiensi Biaya Operasional dan Pemeliharaan.	-	5%	10%	20%	30%
	e. Penyesuaian Tarif	-	15%	-	15%	-
	f. Penataan Sumber-sumber Pendapatan.	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali

F. Proyeksi Keuangan Lima Tahunan

Capaian kinerja keuangan lima tahunan yang diproyeksikan mengacu pada:

1. Rencana pencapaian layanan BLUD unit kerja lima tahun.
2. Neraca dan laba rugi tahun 2013.

Dengan acuan tersebut maka perkiraan capaian kinerja keuangan tahunan selama lima tahun yang akan datang adalah sebagai berikut:

PROYEKSI KEUANGAN LIMA TAHUNAN BLUD

No.	Uraian	Tahun Pelaksanaan				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
	Pendapatan dan Laba Rugi					
1	Pendapatan	2,200,000,000	2,200,000,000	2,530,000,000	2,530,000,000	2,909,500,000
	1.1. Pendapatan Jasa Layanan	2,200,000,000	2,200,000,000	2,530,000,000	2,530,000,000	2,909,500,000
	a. Wisma Lampung	1,570,000,000	1,570,000,000	1,805,500,000	1,805,500,000	2,076,325,000
	b. Anjungan Lampung	630,000,000	630,000,000	724,500,000	724,500,000	833,175,000
	1.2. Pendapatan Lain-lain					
	a. Jasa Giro					
	b. Hasil Kerja Sama					
	c. Lain-lain					
2	Biaya	1,738,650,000	1,738,650,000	1,999,447,500	1,999,447,500	2,299,364,625
	2.1. Biaya Operasional	1,738,650,000	1,738,650,000	1,999,447,500	1,999,447,500	2,299,364,625
	2.1.1. Biaya Pelayanan	1,301,637,000	1,301,637,000	1,496,882,550	1,496,882,550	1,721,414,933
	a. Biaya pegawai	100,800,000	100,800,000	115,920,000	115,920,000	133,308,000
	b. Biaya bahan	393,120,000	393,120,000	452,088,000	452,088,000	519,901,200
	c. Biaya jasa pelayanan	105,408,000	105,408,000	121,219,200	121,219,200	139,402,080
	d. Biaya pemeliharaan	66,283,000	66,283,000	76,225,450	76,225,450	87,659,268
	e. Biaya barang dan jasa	621,626,000	621,626,000	714,869,900	714,869,900	822,100,385
	f. Biaya pelayanan lain-lain	14,400,000	14,400,000	16,560,000	16,560,000	19,044,000

1	2	3	4	5	6	7
	2.1.2. Biaya Umum dan Administrasi	437,013,000	437,013,000	502,564,950	502,564,950	577,949,693
	a. Biaya pegawai	384,600,000	384,600,000	442,290,000	442,290,000	508,633,500
	b. Biaya administrasi kantor	7,233,000	7,233,000	8,317,950	8,317,950	9,565,643
	c. Biaya pemeliharaan	0	0	0	0	0
	d. Biaya barang dan jasa	30,180,000	30,180,000	34,707,000	34,707,000	39,913,050
	e. Biaya promosi	0	0	0	0	0
	f. Biaya umum dan administrasi lain-lain	15,000,000	15,000,000	17,250,000	17,250,000	19,837,500
	2.2. Biaya Non Operasional	0	0	0	0	0
	a. Biaya bunga	0	0	0	0	0
	b. Biaya administrasi Bank	0	0	0	0	0
	c. Biaya kerugian penjualan aset tetap	0	0	0	0	0
	d. Biaya kerugian penurunan nilai	0	0	0	0	0
	e. Biaya non operasional lain-lain	0	0	0	0	0
	Laba sebelum pajak	461,350,000	461,350,000	530,552,500	530,552,500	610,135,375

G. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja

Pelaksanaan Rencana Strategis Bisnis ini perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi dari pada kinerja yang telah dilakukan, pemantauan dan evaluasi ini dapat diartikan:

1. suatu pengamatan yang obyektif dan sistimatis tentang keragaman kegiatan strategis bisnis, apakah telah sesuai dengan sasaran tahunan yang telah ditetapkan.
2. menilai apakah sumber daya yang telah dimanfaatkan sesuai dengan rencana baik kuantitasnya maupun kualitasnya.
3. melakukan monitoring sehingga dari awal telah dapat diketahui kekurangan serta melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga sasaran kegiatan dapat dicapai secara optimal.
4. serta melakukan evaluasi sejauh mana tingkat keberhasilan suatu program/ kegiatan strategis dapat dicapai sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Pemantauan dan evaluasi ini didasarkan pada rencana kegiatan tahunan, yang dilakukan secara periodik yaitu semesteran dan tahunan, dilihat dari aspek evaluasi kinerja kegiatan, evaluasi kinerja program serta dilakukan evaluasi kinerja akuntabilitas keuangan.

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.